

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MARNING DI DESA LEBAK KECAMATAN GRABAG

Anung Setio Wadi dan Eny Kusdarini, M.Hum.
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning di Desa Lebak Kecamatan Grabag dan mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM marning di Desa Lebak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang, Ketua kelompok Sekar Marning dan anggota kelompok Sekar Marning. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning sudah baik karena kepentingan anggota-anggota kelompok Sekar Marning sudah terpenuhi. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM melaksanakan 3 program pengembangan yaitu (1) Program Pengembangan kewirauahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dengan kegiatan pelatihan manajemen produk, pelatihan kemasan produk, dan manajemen UMKM (2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dengan kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, dan pemasaran produk (3) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitas pengembangan UMKM. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM Marning antara lain ketersedianya dana, dan adanya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat masih kurangnya bantuan fasilitas berupa *oven* menyulitkan pelaku UMKM untuk mengeringkan marning, dan belum tersedianya fasilitas berupa listrik disebagian tempat usaha.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pengembangan, UMKM Marning.*

Implementation of Magelang Government Policy in Developing Micro, Small and Medium Enterprises *Marning* in *Desa Lebak, Kecamatan Grabag*

By:
Anung Setio Wadi
NIM 09401244037

ABSTRAK

The objective of this research study was to identify the implementation of Magelang Government Policy in developing Micro, Small and Medium Enterprises (*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM*) *Marning* in *Desa Lebak, Kecamatan Grabag* and to identify the supports and obstacles factors of the implementation.

This research was descriptive study using qualitative approach. The subjects were *Kepala Bidang Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang* and members of *UMKM Sekar Marning*. The collecting data techniques were interview, observation and documentation. Triangulation technique was used to examine the data validity. The qualitative data were analyzed by collecting data, reducing data, displaying data and taking conclusions.

This research study showed that the implementation of programs in developing *UMKM Marning* was good because the interests of all members *UMKM Sekar Marning* were completed based on regulation of Central Java No 13 Year 2013 about *UMKM*. There were 3 developing programs (1) Programs in developing entrepreneur and competitive superiority *UMKM* by giving training of product management and wrapper and training to manage *UMKM* (2) Programs in developing systems for supporting *UMKM* by giving socialization about capital provider and product wrapper. (3) Programs in creating conducive trade by giving facilities to develop the *UMKM*. There were some factors that support in the implementation of the policy, such as the availability of the fund, cooperation of some sides, tools and infrastructures. Besides, there were some obstruction of the implementation, such as there was no oven to dry *Marning* and no electric yet in some places.

Keywords: *Implementation of the policy, Developing, UMKM Marning*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 13,33 Persen dan sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, selanjutnya pada periode September 2011 tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen. Pada Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,96 persen (29.13 juta jiwa). Pemerintah berharap tingkat kemiskinan nasional akan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013. (www.bappenas.go.id, diakses tanggal 15 November 2013 pukul 14.00 WIB) .

Salah satu upaya Pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diprediksikan akan mampu mereduksi kemiskinan di Indonesia, hal ini karena dari berbagai data yang ada penyebab kemiskinan yang utama di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Adanya kenyataan yang demikian maka salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan bagi orang miskin tersebut. UMKM memiliki peranan yang bisa dikembangkan sebagai salah satu potensi penciptaan lapangan kerja bagi penduduk miskin. (Erwan, 2007:308).

Pemerintah melakukan program pengembangan UMKM di Pedesaan karena sebagian besar atau sekitar 89% dari jumlah UMKM terdapat di pedesaan, sehingga kelompok usaha tersebut akan menjadi motor penggerak pembangunan dan roda perekonomian pedesaan. Pembangunan di pedesaan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. UMKM di pedesaan bisa menjadi faktor pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di mana lahan pertanian semakin sempit karena berbagai hal. Jika UMKM bisa tumbuh pesat, maka produktivitas usaha di pedesaan akan meningkat, migrasi penduduk dari desa ke kota berkurang secara signifikan, (Tambunan,2002: 46)

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan salah satu Kecamatan di Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Grabag, di Kecamatan Grabag terdiri

dari 28 desa, salah satunya yaitu Desa Lebak, UMKM di Desa Lebak terdapat 131 UMKM Marning yang dimiliki secara perorangan dengan menampung 256 orang tenaga kerja. Desa Lebak, dengan luasan wilayah 234.874 ha, dan memiliki luas sawah 191.691 ha, dengan melihat kondisi lahan di Desa Lebak mempunyai potensi untuk budidaya jagung. Jenis jagung yang dibudidayakan di Desa Lebak berjenis jagung lokal putih dikarenakan cocok sebagai bahan baku pembuatan marning, sehingga keistimewaan Desa Lebak terkenal sebagai sentra penghasil Marning di Kabupaten Magelang. Dari hasil panen petani jagung di Desa Lebak belum mencukupi kebutuhan akan jagung lokal putih sebagai bahan dasar pembuatan Marning, sehingga para pengrajin Marning masih mendatangkan bahan baku dari luar Desa bahkan dari luar Kabupaten. Hasil panen dari petani jagung di Desa Lebak baru mencukupi sekitar 50% dari kebutuhan bahan baku jagung untuk pembuatan marning.

Dari kondisi tersebut para pengrajin marning bergabung dalam kelompok yang diberi nama “*Sekar Marning*” para petani pengrajin marning merasa bahwa dengan berkelompok atau berada dalam suatu wadah merasa mempunyai posisi tawar yang lebih baik dalam memperoleh bahan baku maupun dalam pemasaran marning itu sendiri. Kelompok Sekar Marning sendiri dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Juni 2008 sehingga kebijakan UMKM sudah dilaksanakan di Desa Lebak sejak tahun 2008. Pelaksanaan kegiatan kelompok usaha Sekar Marning masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi, seperti keterbatasan modal, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi untuk proses pengeringan Marning, keterbatasan SDM dengan kualitas yang baik, keterbatasan informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran, selain itu belum ada yang mendapatkan sertifikat Halal dan masih ada yang belum mendapatkan nomor Depkes. sehingga masalah-masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah bersifat multidimensi. (Pra Penelitian di Desa Lebak, Senin 25 November 2013).

Permasalahan tersebutlah yang menjadi titik fokus Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan sector UMKM di Desa Lebak. Sebab hal-hal tersebut dapat menyebabkan jalannya usaha UMKM sulit untuk berkembang secara optimal. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mengupayakan peningkatan beberapa aspek, yaitu akses terhadap pasar, modal, manajemen, teknologi, serta penguatan dan penataan kelembagaan UMKM. Beberapa aspek tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar dan kemitraan antara ketiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Swasta, serta UMKM.

Pengembangan sektor UMKM di Desa Lebak dirasa sangat penting untuk dilakukan, sebab sektor UMKM mampu memberikan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maka dari itu, merupakan tugas utama bagi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang untuk melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi di Bidang Koperasi dan UMKM. Sebagai konsekuensinya, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM melakukan berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor UMKM. Hal inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan, yaitu masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan. Pemerintah Kabupaten Magelang mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM di Desa Lebak, Kabupaten Magelang.

Di dalam suatu penelitian yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar memberikan manfaat juga. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magelang dalam usaha mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning di Desa Lebak. Selain itu penelitian ini juga

Mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak.

PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*.

Kemudian telah ditentukan subjek penelitian yaitu, kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang dan kepala kelompok Sekar Marning dan anggota kelompok Sekar Marning. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *Triagulasi*. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, dengan melalui empat tahap yaitu pengumpulan Data, Reduksi data, *Display* data, Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak terdiri dari tiga program yaitu :
 - a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
 - b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM.

- c. Program penciptaan iklim usaha yang Kondusif
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning Desa Lebak
 - a. Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Jaringan kerjasama dari berbagai pihak
 - c. Sarana dan Prasarana tempat pelatihan
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning Desa Lebak
 - a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia
 - b. Banyak produsen yang kesulitan dalam proses pengerinan
 - c. Belum tersedianya sarana dan prasana listrik di sebagian tempat usaha

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak terdiri dari tiga program yaitu:

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten magelang, jika dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu melalui kegiatan pelatihan manajemen produksi, pelatihan kemasan produk dan pelatihan manajemen UMKM.

Pelaksanaan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sudah maksimal, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah meningkatkan teknik produksi dan memberikan bantuan sarana dan

prasarana berupa alat alat, dan kelompok sekar marning memenuhi persyaratan Sertifikasi Halal.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM sejak tahun 2012 telah berusaha melakukan mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen UMKM, Pelatihan manajemen produk, dan pelatihan kemasan produk. Dalam pelatihan Manajemen UMKM materi di berikan bagaimana cara menjalankan usaha, bagaimana membuat pembukuan usaha dan bagaimana manfaat dari pembukuan. Dalam pelatihan manajemen produk, Pemerintah membantu produsen Marning dalam meningkatkan kualitas produk yang lebih bagus lagi dan memenuhi standar maka di ajarkan pelatihan manajemen produk ini. Dalam pelatihan kemasan produk di jelaskan cara menggunakan pelabelan pada kemasan, cara menyablun kemasan, Dengan melakukan pelatihan Manajemen produk, Pelatihan kemasan produk, pelatihan manajemen UMKM ini dapat meningkatkan sumber daya manusia UMKM Marning di Desa Lebak.

- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, jika dikaitkan dengan pasal 8 Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM memperluas sumber pendanaan dengan bekerjasama dan berkordinasi dengan lembaga perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bapas, dan Bank Jateng. Dalam memfasilitasi para pengusaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan sosialisasi penyediaan permodalan melalui Dinas

Perindustrian Koperasi dan UMKM untuk memberikan informasi langsung kepada para produsen Marning mengenai bagaimana cara pengusaha marning bisa mendapatkan pinjaman modal dari Pemerintah yang disertai dengan sharing atau konsultasi langsung atas berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha terkait dengan permodalan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang. Peserta dalam kegiatan ini tentu saja adalah dari para pelaku usaha UMKM, tidak semua unit usaha UMKM yang ada di Kabupaten Magelang menjadi peserta, sebab pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan secara bergiliran pada tahun ini menjadi giliran UMKM Marning di Desa Lebak. Kegiatan sosialisasi penyediaan permodalan ini dilakukan selama satu kali, yang mengambil tempat di Kantor Desa Lebak.

Jika dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tidak melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melakukan penyebarluasan informasi pasar melalui kegiatan temu bisnis/usaha dengan Pemerintah Daerah Kabupaten lain dengan tujuan untuk mempromosikan produk unggulannya kepada Daerah lain. Temu bisnis juga sering dilakukan kepasar-pasar modern untuk mempermudah pemasaran dan mendapatkan konsumen.

c. Program penciptaan iklim usaha yang Kondusif

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana yang di berikan kepada kelompok usaha marning di Desa Lebak yaitu bantuan alat alat usaha, alat alat usaha itu antara lain wajan Almunium, las plastik, mesin parut jagung, oven gas 2,

serok, solet, baskom, kompor gas tungku, tabung gas, selang regulator, dan soaler.

Dalam pengembangan desain dan teknologi, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM telah meningkatkan kemampuan dalam bidang desain dan teknologi hal ini di tujukan dengan pemberian bantuan berupa alat mesin pemipil jagung dengan bantuan alat pemipil jagung bertujuan untuk mempermudah pemipilan jagung yang semula masih dengan cara tradisional sekarang bisa dilakukan dengan mesin, bantuan alat pengemas produk berupa las plastik dan mesin *hand saler* dengan adanya bantuan alat ini proses pengemasan yang semula di lakukan dengan cara sederhana sekarang di lakukan dengan lebih baik dan dilengkapi dengan lebel dan merek, bantuan alat-alat memasak dengan bahan *stainlees steel* bertujuan menjaga kebersihan produk, bantuan *oven* bertujuan mempermudah dalam pengeringan Marning.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning Desa Lebak
 - a. Dana

Semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Perundistrian Koperasi dan UMKM pelaksanaanya disesuaikan dengan besaran APBD Kabupaten Magelang.
 - b. Jalinan kerjasama

Beberapa lembaga yang mendukung program pengembangan UMKM misal Dinas Kesehatan sudah memfasilitasi pembuatan sertifikat Halal dan lembaga pembiayaan modal dalam hal pemberian bantuan kredit untuk perkuatan usaha UMKM sudah berjalan sesuai yang di harapkan anggota kelompok Sekar Marning.
 - c. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelatihan manajemen produksi Pemerintah Kabupaten Magelang sudah memberikan tempat dan konsumsi, tentor yang didatangkan punberkompeten dibidangnya.

3. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Marning Desa Lebak

a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia.

Dalam menjalankan program-program pengembangan UMKM Marning, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM masih kekurangan sumber daya manusia, karena banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Magelang sedangkan pegawai jumlahnya sedikit

b. Banyak produsen yang kesulitan dalam proses pengeringan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memberikan bantuan *oven* tapi jumlahnya yang masih sedikit belum bisa memenuhi kebutuhan *oven* di kelompok Sekar Marning, sehingga pada musim hujan produsen Marning masih kesulitan dalam proses pengeringan,

c. Belum tersedianya sarana dan prasana listrik di sebagian tempat usaha.

Letak sebagian tempat usaha yang di dekat perkebunan dan jauh dari rumah penduduk membuat sebagian tempat produksi Marning belum mendapatkan jaringan listrik, dengan tidak adanya fasilitas berupa listrik membuat sebagian produsen tidak dapat bekerja lembur pada malam hari.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan UMKM di Desa Lebak berjalan dengan baik karena

kepentingan anggota-anggota kelompok Sekar Marning sudah terpenuhi, Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM melaksanakan tiga program pengembangan yaitu a. Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dengan kegiatan pelatihan manajemen produk, pelatihan kemasan produk, dan manajemen UMKM b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dengan kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, dan pemasaran produk c. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kegiatan fasilitas pengembangan UMKM

2. Faktor Pendorong dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak antara lain Ketersediaannya dana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dapat melaksanakan program-program pengembangan bisa dilaksanakan dengan baik, selain dana, Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Dinas Kesehatan Lembaga Perbankan dan UD Yasinta mendorong proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik, selain itu dengan adanya sarana prasarana berupa tempat yang memadai dan fasilitas lainnya menjadikan peserta pelatihan merasa nyaman dan betah sehingga para peserta dapat dengan mudah menerima materi pelatihan-pelatihan yang disampaikan.
3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan UMKM Marning di Desa Lebak antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. kurangnya bantuan fasilitas produksi berupa *oven* menyulitkan pelaku usaha untuk mengeringkan Marning pada

musim hujan, dan belum tersedianya fasilitas berupa listrik di tempat usaha

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diberikan saran berikut ini:

1. Pemerintah diharapkan memberikan alat produksi agar bisa lebih meningkatkan proses produksi.
2. Pemerintah di harapkan menyediakan penelitian pemasaran supaya pemasaran produk lebih meningkat ketingkat export.
3. Pemerintah tidak hanya membentuk kelompok usaha tapi di harapkan membentuk lembaga koperasi agar bisa berlangsung kegiatan simpan pinjam.
4. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan sosialisasi informasi dukungan permodalan tapi juga memberikan bantuan dana bergulir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. ____Data kemiskinan di Indonesia. (www.bappenas.go.id, diakses tanggal 15 November 2013 pukul 14.00 WIB)
- [2]. Purwanto, Erwan Agus. 2007 *Strategi Budaya untuk pemulihan Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta*.
- [3]. Tambunan, Tulus, TH (2002) *Usaha Mikro Kecil di Indonesia dan beberapa isu penting : Jakarta : Saleba Empat*
- [4]. Lexy Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [5]. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- [6]. Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.